



Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Pengelolaan Organisasi Sektor Publik

Devina Shava Amalia^{1*}, Muhammad Taufik Hidayat²

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

email: shavaamalia602@gmail.com

Article Info :

Received:

04-7-2025

Revised:

29-7-2025

Accepted:

03-8-2025

Abstract

This study was motivated by the complex challenges in managing public sector organizations, particularly those related to resource constraints and increasing public demands for efficiency and accountability in service delivery. The objective of this study is to analyze the application of economic principles such as resource allocation efficiency, cost-benefit analysis, and performance-based budgeting in public sector policy and management. The method used is a descriptive qualitative approach with literature review techniques, which allows researchers to explore relevant literature, statistical data, and policies in depth. The results of the study show fundamental differences between the public and private sector economic approaches, as well as the importance of targeted resource allocation to create adaptive and effective governance. Data on infrastructure investment, state budget expenditure, and regional public spending show a tendency for allocation to remain dominated by routine expenditure, with a relatively low proportion of productive investment. The integration of economic principles through digitalization, fiscal reform, and strengthening bureaucratic capacity is crucial for creating a more responsive, efficient, and welfare-oriented government.

Keywords : *Economic Principles, Public Sector, Budget Efficiency, Public Policy, Resource Allocation.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan kompleks dalam pengelolaan organisasi sektor publik, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap efisiensi serta akuntabilitas pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi seperti efisiensi alokasi sumber daya, analisis biaya-manfaat, dan penganggaran berbasis kinerja dalam kebijakan dan manajemen sektor publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam literatur, data statistik, dan kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pendekatan ekonomi sektor publik dan swasta, serta pentingnya alokasi sumber daya yang tepat sasaran untuk menciptakan tata kelola yang adaptif dan berdaya guna. Data investasi infrastruktur, pengeluaran APBN, dan belanja publik daerah memperlihatkan kecenderungan alokasi yang masih dominan pada pengeluaran rutin, dengan porsi investasi produktif yang relatif rendah. Integrasi prinsip ekonomi melalui digitalisasi, reformasi fiskal, dan penguatan kapasitas birokrasi menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Prinsip Ekonomi, Sektor Publik, Efisiensi Anggaran, Kebijakan Publik, Alokasi Sumber Daya.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pengelolaan organisasi sektor publik saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Di tengah keterbatasan sumber daya, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut pemerintah dan lembaga publik untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan transparan (Suacana, 2025). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi, terutama yang berkaitan dengan efisiensi alokasi sumber daya, analisis biaya-manfaat, serta pengambilan keputusan rasional, menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam praktik pengelolaan sektor publik.

Yuni, & Wahyu (2025) menegaskan berbeda halnya dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit, organisasi sektor publik berfokus pada pencapaian tujuan sosial dan pelayanan masyarakat. Prinsip dasar ilmu ekonomi tetap dapat diterapkan, seperti upaya meminimalkan pemborosan anggaran, optimalisasi output dengan input seminimal mungkin, serta alokasi sumber daya berdasarkan skala prioritas kebutuhan publik. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam sektor publik memungkinkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan prinsip ekonomi seperti teori insentif, efisiensi Pareto, dan penganggaran berbasis kinerja dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknokratis, tetapi juga dampak ekonomi jangka panjang (Salman, & Ikbal, 2025). Dengan pendekatan ini, organisasi sektor publik tidak sekadar menjalankan program berdasarkan prosedur administratif, tetapi juga mengevaluasi nilai tambah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam sektor publik menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Prinsip efisiensi dan efektivitas, sebagai bagian fundamental dari ilmu ekonomi, menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai seberapa baik sumber daya publik dialokasikan dan digunakan dalam menghasilkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam negara berkembang menurut Nabila (2025) kebutuhan masyarakat tinggi dan sumber daya terbatas, penerapan prinsip ekonomi menjadi prasyarat dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan peningkatan kualitas layanan publik.

Organisasi sektor publik pada dasarnya merupakan entitas yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada pencapaian tujuan sosial. Namun demikian, ketidakhadiran motif laba bukan berarti pengelolaan dapat berjalan tanpa mempertimbangkan efisiensi. Justru, pengelolaan yang tidak efisien dalam sektor publik dapat berdampak langsung pada ketimpangan distribusi pelayanan, pemborosan anggaran, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Kewo, 2024).

Pendekatan ekonomi dalam sektor publik tidak hanya sebatas perhitungan biaya dan manfaat, tetapi juga mencakup analisis perilaku birokrasi, respon terhadap kebijakan insentif, serta dinamika permintaan dan penawaran atas layanan publik. Melalui prinsip rasionalitas ekonomi, Sawir (2020) mengatakan para pengambil kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini mendorong terciptanya sistem pengukuran kinerja yang objektif untuk mengevaluasi pencapaian program-program pemerintah.

Rezariski (2020) menyatakan reformasi birokrasi yang saat ini digencarkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, turut menempatkan prinsip ekonomi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Program penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), efisiensi belanja publik, dan desentralisasi fiskal merupakan contoh konkret dari penerapan prinsip ekonomi dalam reformasi tata kelola sektor publik. Organisasi sektor publik diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga mampu bertindak sebagai institusi yang adaptif, efisien, dan responsif dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat diintegrasikan secara strategis dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Kajian ini juga akan membahas pembagian peran dan tanggung jawab dalam struktur organisasi publik untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut. Harapannya, dengan penerapan yang tepat, prinsip ekonomi mampu meningkatkan efisiensi kebijakan, kualitas pelayanan, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Adlini, et.al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis teoritis dan konseptual mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menghimpun, menelaah, dan menyintesis berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen kebijakan yang relevan dalam bidang ekonomi dan administrasi publik.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui buku teks ekonomi publik, jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, dokumen perencanaan anggaran publik, serta publikasi resmi dari badan-badan (Wiresti, 2020). Studi kasus yang telah dipublikasikan juga dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan prinsip ekonomi dalam praktik manajerial sektor publik.

Teknik analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*), dengan cara menelaah substansi isi literatur dan dokumen yang dikumpulkan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti efisiensi anggaran, alokasi sumber daya, dan pengukuran kinerja publik. Informasi tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi relevansi, kelebihan, serta kendala dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi di lingkungan organisasi sektor publik. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan tata kelola sektor publik yang berbasis pendekatan ekonomi (Arafat, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pendekatan Ekonomi antara Sektor Publik dan Sektor Swasta

Menurut Dharma Setiawan Negara, et.al., (2024) sektor publik meliputi pemerintah pusat, daerah, serta BUMN didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Tujuannya bukan untuk mencari laba, melainkan menyediakan barang publik dan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta regulasi ekonomi. Pendekatan ekonomi sektoral ini dioperasikan berdasarkan analisis ekonomi publik (*public economics*) yang berfokus pada efisiensi sosial, redistribusi, dan sinergi publik-swasta.

Sebaliknya, sektor swasta dimotivasi oleh penciptaan nilai dan profit. Modal dikumpulkan melalui investor, pinjaman bank, atau pasar modal. Pengambilan keputusan cepat, inovatif, dan sangat responsif terhadap permintaan pasar (Yuni, & Wahyu, 2025). Target utama adalah pertumbuhan, pangsa pasar, dan profitabilitas jangka panjang.

Dalam hal pendanaan, mengutip Mustanir, et. al. (2023) menerangkan bahwa sektor publik mengandalkan pajak, obligasi pemerintah, dan APBN/APBD. Sektor swasta memperoleh sumber modal dari pinjaman bank, penerbitan saham, atau retained earnings. Fleksibilitas pendanaan sektor swasta jauh lebih tinggi, tetapi juga bergantung pada kondisi kredit dan kepercayaan investor. Saggaf, et. al. (2018) memandang dalam proses pengambilan keputusan, sektor publik cenderung birokratis dan lambat karena melibatkan regulasi, audit, dan penilaian publik. Sektor swasta relatif lebih gesit dapat cepat beradaptasi, mengambil risiko, dan berinovasi menurut tren pasar dan kebutuhan konsumen.

Suatu pendekatan campuran (*mixed economy*) sering ditemukan, misalnya Pancasila Ekonomi di Indonesia, yang menyeimbangkan kepemilikan negara dan partisipasi swasta untuk mencapai pembangunan inklusif tanpa ekstremisme kapitalisme atau sosialisme penuh (Karimi, 2024). Tabel berikut menampilkan data riil investasi infrastruktur di Indonesia serta kontribusi sektor publik dan swasta dari periode terkini:

Tabel 1. Investasi Publik dan Swasta di Indonesia

Tahun	Investasi Publik (USD miliar)	Investasi Swasta (USD miliar)	% Swasta dari GDP
2011	ca. 8	ca. 14,2	~4-5%
2016	ca. 10	ca. 14-15	—
2023	—	~12 total FDI sektor non-BUMN	~6% investasi total

Sumber: Statista, (2025) dan Reuters, (2025)

Data tabel 1 mengenai investasi publik dan swasta di Indonesia menunjukkan dinamika kontribusi kedua sektor dalam pembangunan ekonomi nasional selama lebih dari satu dekade terakhir. Pada tahun 2011, investasi publik diperkirakan mencapai sekitar USD 8 miliar, sedangkan investasi swasta tercatat lebih tinggi, yaitu sekitar USD 14,2 miliar, dengan proporsi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan berkisar antara 4-5 persen. Hal ini mengindikasikan dominasi

sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui investasi langsung dalam proyek-proyek non-pemerintah (Sagena, 2005).

Memasuki tahun 2016 dalam Statista, (2025) dan Reuters, (2025) sebagaimana tabel 1, investasi publik mengalami peningkatan menjadi sekitar USD 10 miliar, sementara investasi swasta tetap berada dalam kisaran USD 14 hingga 15 miliar. Meski proporsi terhadap PDB tidak disebutkan secara eksplisit, tren tersebut mengindikasikan upaya pemerintah untuk memperbesar peran fiskal dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik, seiring dengan upaya menjaga iklim investasi swasta yang tetap kondusif.

Pada tahun 2023, dari tabel 1 data investasi publik tidak tersedia secara eksplisit, namun nilai *Foreign Direct Investment* (FDI) dari sektor non-BUMN yang merepresentasikan porsi besar dari investasi swasta mencapai sekitar USD 12 miliar. Nilai ini setara dengan sekitar 6 persen dari total investasi nasional, berdasarkan proyeksi tahunan sebesar 477,7 triliun rupiah (atau sekitar USD 60 miliar).

Perkembangan ini menegaskan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Sejalan dalam Fajri & Fatticia (2025) menyatakan sektor publik berperan sebagai katalis melalui penyediaan infrastruktur dasar dan kebijakan insentif, sementara sektor swasta mendorong efisiensi, inovasi, dan ekspansi ekonomi melalui mekanisme pasar. Data tabel 1 menunjukkan bahwa peran sektor swasta cenderung semakin besar dari waktu ke waktu, baik dalam nilai absolut maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB nasional.

Prinsip Alokasi Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan Ekonomi di Sektor Publik

Alokasi sumber daya di sektor publik didasarkan pada prinsip efisiensi sosial, pemerataan, dan stabilitas makroekonomi. Pemerintah bertindak sebagai penentu prioritas melalui *cost-benefit analysis* dan alokasi prioritas ("*mission-oriented policies*") sebagaimana dikutip oleh Probandari (2007) untuk menghadapi tantangan publik seperti perubahan iklim dan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan mencapai kesejahteraan kolektif, bukan semata efisiensi pasar.

Proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai tahap institusional mulai perencanaan, konsultasi legislatif, audit, dan evaluasi. Yulanda, et. al. (2024) mengatakan prinsip-prinsip seperti *participatory budgeting* memungkinkan masyarakat turut memilih proyek publik, sehingga memperkuat legitimasi dan memperbaiki efisiensi alokasi. Namun tantangan seperti *principal-agent problem* sebagaimana dalam Busdir (2022) sering menurunkan efektivitas implementasi akibat kurangnya *alignment* antara birokrat dan kebijakan pusat.

Dalam teori *public choice*, model *budget-maximizing* menunjukkan bahwa birokrat cenderung memperbesar anggaran demi kekuasaan institusional, bukan hasil sosial maksimal. Studi efisiensi publik di Indonesia dalam Kirana & Saleh (2011) bahwa pada era desentralisasi juga menunjukkan variasi efisiensi antar provinsi; peningkatan alokasi tidak selalu berkorelasi positif dengan hasil pelayanan publik seperti pendidikan atau kesehatan.

Menurut SNGWOFI (2020) di Indonesia tahun 2020 pengeluaran pemerintah daerah mencapai 9,1 % GDP dan menyumbang 46,6 % dari total pengeluaran publik. Dari jumlah tersebut, 56,2 % untuk kompensasi pegawai, 2,4 % untuk subsidi dan transfer, serta 1,4 % untuk investasi publik (GFCF) menunjukkan bahwa porsi investasi langsung dari belanja daerah relatif kecil.

Tabel 2. Komposisi Utama Pengeluaran Indonesia

Klasifikasi Belanja	% GDP (2020)	% dari Pengeluaran Daerah
Total Belanja	9,1 %	100 %
Kompensasi Pegawai	3,1 %	56,2 %
Konsumsi Antara	2,0 %	50,7 %
Subsidi & Transfer	2,4 %	71,6 %
Belanja Modal (Investasi)	1,5 %	46,4 %
Investasi Publik (GFCF)	1,4 %	44,3 %

Sumber: Data olahan, 2025

Dari tabel 2 menunjukkan komposisi utama pengeluaran subnasional Indonesia sebagian besar digunakan untuk operasional birokrasi dan transfer sosial, sedangkan investasi infrastruktur langsung (GFCE) relatif rendah dari total anggaran. Hal ini mencerminkan bahwa prioritas utama sektor publik lebih ke keberlanjutan operasional daripada pembangunan produktif. Data tabel 2 juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas alokasi, di mana pembiayaan jangka pendek dan pengeluaran rutin mendominasi, sementara investasi jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah.

Beberapa tantangan utama dalam pengambilan keputusan alokasi menurut Sawir et. al. (2025) adalah penyimpangan dana, kurangnya transparansi anggaran seperti praktik pembatasan informasi APBD di beberapa daerah, donasi korupsi dalam tender publik yang menyebabkan inefisiensi dan penyimpangan alokasi sumber daya. Birokrasi yang lambat dan kurangnya data kualitas membuat biaya dan manfaat alokasi sulit dievaluasi dengan tepat.

Reformasi fiskal tampak penting dengan penggunaan *big-data* dan teknologi untuk *real-time feedback*, serta penetapan indikator kinerja berbasis *outcome* dapat memperbaiki efisiensi alokasi publik (Laksana, 2024). Kombinasi *cost-effectiveness tools* (seperti ICER/QALY di sektor kesehatan) dan demokratisasi anggaran (*participatory budgeting*) dapat meningkatkan efektivitas belanja publik dengan memprioritaskan intervensi yang menghasilkan nilai sosial paling tinggi serta investasi keberlanjutan jangka panjang.

Penerapan Prinsip Ekonomi dalam Kebijakan Pemerintah

Merujuk Hui Jin (2018) pemerintah menggunakan prinsip efisiensi alokasi sumber daya melalui anggaran negara (APBN), dengan menyeimbangkan antara stabilitas makro, belanja prioritas sosial, dan kontrol defisit fiskal. Sejak awal 2000-an, Indonesia menerapkan aturan fiskal kaku seperti batas defisit maksimum 3% dari PDB dan rasio utang publik di bawah 60%. Prinsip ini memperkuat kepercayaan investor dan menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Dalam kebijakan belanja, pemerintah menerapkan prinsip redistribusi melalui program subsidi, transfer wilayah, serta bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Semua ini dirancang untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan, sekaligus menjaga konsumerisme domestik yang inklusif (Rais, et. al., 2025).

Pemerintah menitikberatkan investasi dalam infrastruktur strategis sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dalam sepanjang 2015–2019, menurut Kemenkorekom. (2014) dibutuhkan investasi Rp 4.796 triliun dengan porsi terbesar dari sektor swasta (42%), disusul APBN (37%) dan BUMN (21%). Strategi ini mencerminkan prinsip ekonomi pembangunan berorientasi output produktif. Pada masa krisis, seperti krisis 2009 dan resesi akibat pandemi, kebijakan pemerintah mencakup stimulus fiskal berupa pengurangan pajak, transfer tunai langsung, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Modelling ekonomi menyatakan stimulus ini meningkatkan GDP nasional hingga 0,2% dari skenario baseline dalam jangka pendek.

Tabel 3. Kategori Alokasi APBN

Kategori	% GDP (2022)	% Pendapatan (2022)	% GDP (2024)	% Pendapatan (2024)
Infrastruktur	5.0 %	24.45 %	6.0 %	26.21 %
Kesehatan	3.66 %	17.90 %	3.5 %	15.29 %
Otonomi Daerah	4.71 %	23.02 %	4.0 %	17.47 %
Subsidi dan Transfer Sosial	1.4 %	7.33 %	2.0 %	8.73 %
Pembayaran Bunga Utang	2.08 %	10.21 %	1.0 %	4.36 %

Sumber: Data olahan, 2025

Data dari tabel 3 menunjukkan bahwa investasi infrastruktur meningkat signifikan dari ~5% PDB (2022) menjadi ~6% (2024), memperlihatkan penerapan prinsip prioritas pembangunan produktif. Sementara itu, porsi pendapatan yang dialokasikan untuk subsidi sosial dan transfer juga meningkat,

menandai keberlanjutan prinsip redistribusi. Pengurangan porsi pembayaran bunga utang antara 2022 dan 2024 mencerminkan pengelolaan utang yang lebih efisien dan menurunnya beban fiskal jangka panjang.

Meski prinsip-prinsip ekonomi di atas dijadikan panduan, Pohan (2021) menerangkan tantangan seperti rendahnya penerimaan pajak (Indonesia berada di level terendah ASEAN), birokrasi lambat, dan ketimpangan implementasi antar daerah tetap menjadi hambatan utama. Tanpa penerimaan yang mencukupi, kebijakan belanja prioritas akan terhambat.

Untuk memperkuat penerapan prinsip ekonomi, pemerintah perlu melanjutkan reformasi publik berupa penguatan penerimaan wajib pajak (tanpa menaikkan tarif), menghapus subsidi yang tidak efisien, memprioritaskan belanja modal produktif seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan (Firdausy, 2021). Kombinasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran, inklusif, dan berbasis data serta outcome akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi.

Penerapan prinsip ekonomi dalam kebijakan pemerintah tidak hanya berdampak pada efisiensi internal anggaran, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap indikator makroekonomi dan persepsi pasar. Konsistensi dalam menjaga defisit fiskal dan rasio utang terhadap PDB menurut Pratiwi (2024) telah meningkatkan kredibilitas fiskal Indonesia di mata lembaga pemeringkat global seperti *Moody's* dan *Fitch Ratings*. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga juga turut memperkuat nilai tukar rupiah, menekan inflasi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif (Nuraini, et. al., 2025). Disiplin fiskal dan pengelolaan sumber daya yang rasional bukan hanya soal efisiensi teknokratik, melainkan elemen strategis dalam menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat fondasi ekonomi nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pengelolaan organisasi sektor publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Prinsip seperti efisiensi alokasi sumber daya, pengambilan keputusan rasional, dan penganggaran berbasis kinerja telah terbukti dapat membantu sektor publik menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan tuntutan transparansi. Data empiris yang disajikan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam menerapkan prinsip ekonomi, masih terdapat ketimpangan dalam alokasi sumber daya, di mana belanja operasional dan birokrasi mendominasi dibandingkan investasi publik produktif. Penting untuk memperkuat prinsip-prinsip ekonomi tidak hanya dalam kebijakan perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan evaluasi program publik.

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian, disarankan agar pemerintah dan pengelola organisasi sektor publik memperluas penggunaan pendekatan berbasis data dan analisis biaya-manfaat dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Reformasi birokrasi perlu dipercepat dengan mendorong transparansi anggaran, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem evaluasi kinerja berbasis outcome. Selain itu, alokasi anggaran hendaknya lebih berorientasi pada investasi jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memiliki efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kapasitas SDM birokrasi dalam memahami prinsip ekonomi juga perlu menjadi prioritas guna memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif, efisien, dan berdaya guna secara sosial maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suacana, I. W. G. (2025). *Manajemen Sektor Publik*. CV Rey Media Grafika.
- Yuni, L. A., & Wahyu, M. (2025). Perbandingan Organisasi Sektor Publik Dan Sektor Swasta: Tujuan, Pembiayaan, dan Struktur. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 989-1004. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.588>
- Salman, S., & Iqbal, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68-72. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.99>
- Nabila, P. (2025). Article Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.36563/jamanta.v5i1.1517>

- Kewo, C. L. (2024). *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori dan Aplikasi*. CV. Azka Pustaka.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Rezariski, A. O. (2020). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(4), 332217. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i4.43>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Wiresti, R. D. (2020). Analisis dampak work from home pada anak usia dini di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 641.
- Arafat, G. Y. (2018). Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 32-48.
- Dharma Setiawan Negara, S. H., Rahmi Jened, S. H., Faizal Kurniawan, S. H., & MH, L. M. (2024). *Penerapan Prinsip Competitive Neutrality Bagi BUMN Dalam Mewujudkan Keadilan Berusaha*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Yuni, L. A., & Wahyu, M. (2025). Perbandingan Organisasi Sektor Publik Dan Sektor Swasta: Tujuan, Pembiayaan, dan Struktur. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 989-1004.
- Mustanir, Ahmad, et. al. (2023). *Teori Administrasi Publik*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 35.
- Saggaf, Said, et. al. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Makassar: Sah Media. 111.
- Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4, 1-10.
- Reuters. (2025). "Indonesia's FDI drops 6.95% y/y in Q2, biggest fall since 2020", tersedia di https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-fdi-drops-695-yy-q2-biggest-fall-since-2020-2025-07-29/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 03 Agustus 2025.
- Statista. (2025). "Private sector investment in infrastructure in Indonesia from 2005 to 2016(in million U.S. dollars)", tersedia di https://www.statista.com/statistics/1056674/indonesia-private-sector-investment-infrastructure/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 03 Agustus 2025.
- Sagena, U. (2005). Pergeseran Model Pembangunan Ekonomi Developmental State Jepang. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(12), 57-76.
- Fajri, N., & Fatticia, R. (2025). Analisis Strategi Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 4, pp. 422-431).
- Probandari, A. (2007). Cost Effectiveness Analysis dalam Penentuan Kebijakan Kesehatan: Sekedar Konsep Atau Aplikatif?. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 10(03).
- Yulanda, A., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Optimalisasi Budgeting Policy dalam Mewujudkan Good Local Governance Pasca Desentralisasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 123-132.
- Busdir, Busdir (2022). Principal-Agent Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Program Anak Tidak Sekolah) Di Kabupaten Mamuju Tengah: Principal-Agent In Implementation Of Basic Policy (A Case Study In Children Out Of School Program) In Central Mamuju Regency. *Disertasi*, Universitas Hasanuddin.
- Kirana, M., & Saleh, S. (2011). Public Sector Efficiency In Indonesia (Fiscal Decentralization Era, 2001–2008). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26(1), 103-128.
- SNGWOFI. (2020). Basic Socio-Economic Indicators, Income Group: Lower Middle Income, Local Currency: Indonesian Rupiah (IDR), tersedia di https://www.sng-wofi.org/country_profiles/indonesia.html?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 03 Agustus 2025.
- Sawir, M., Aljurida, A. A., & Susilawaty, S. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal of Public Policy*, 1(1), 1-16.
- Laksana, S. (2024). Reformasi kebijakan fiskal provinsi jawa barat untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. *Creative Research Journal*, 10(02), 107-132.
- Hui Jin. (2018). "Chapter 5: Supporting Inclusive Growth", *International Monetary Fund*, tersedia di https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781484337141/ch005.xml?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 03 Agustus 2025.

- Rais, L., Halik, W., Taopan, A., Rumodar, M., Yanyaan, R. R., & Saiba, R. L. (2025). Keadilan Sosial dalam Pembangunan: Tinjauan Literatur Terhadap Kebijakan Pembangunan dengan Adanya Efisiensi Anggaran dari Pusat. *Papua Journal of Sociology (PJS)*, 3(1), 38-55.
- Kemenkorekom. (2014). "Pemerintah Bahas Alternatif Pembiayaan Infrastruktur", tersedia di <https://ekon.go.id/unduh/publikasi/1903/pemerintah-bahas-alternatif-pembiayaan-infrastruktur>, diakses pada 03 Agustus 2025.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Firdausy, C. M. (2021). *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pratiwi, C. (2024). Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Putri, Z. D. D., & Astuti, R. P. (2025). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207-213.